



Mempertegas Hukum dan Mengawal Pembangunan Nasional dengan Pendekatan Pers yang Humanis: (Media dan Masyarakat)

Nurfitriani M. Siregar¹⁾, Arifin Hidayat²⁾, Dr. Marlina, MA³⁾, Nurul fadilah Lubis⁴⁾

^{1,2,3,4} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email:

nurfitrianisiregar@gmail.com

Keywords

Law Enforcement, National Development, Press Approach, Humanist, Media

ABSTRACT

Penegakan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi sangat penting bagi negara dan masyarakat. Namun, beberapa orang di Indonesia merasa tidak puas dengan pelaksanaan penegakan hukum karena khawatir terhadap keadilan dan efektivitas hukum. Oleh karena itu, perspektif humanistik harus dimasukkan dalam penegakan hukum. Media dapat berperan sebagai alat pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan menaati hukum. Dengan menggunakan pendekatan pers yang humanis, media dapat memberikan penjelasan yang jelas dan lugas mengenai hak dan tanggung jawab hukum, sehingga membantu masyarakat untuk lebih memahami lanskap hukum. Melalui program atau segmen khusus yang menggali seluk-beluk hukum, media dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi peran media dalam mendorong pendekatan humanistik dalam penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa media, khususnya Pers, berfungsi sebagai wadah pencerahan, menyajikan pemberitaan dalam perspektif humanis, dan memberdayakan masyarakat dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, hal ini menekankan pentingnya pers menaati etika jurnalistik yang bertanggung jawab, diantaranya Kredibilitas dan Kepercayaan Publik, Sumber dan Verifikasi Informasi, Independensi dan Kemandirian, Perlindungan Privasi dan Harga Diri, Pemberitaan Sensasionalisme dan Berita Berimbang.

Pendahuluan

Dalam pembangunan suatu negara, hukum memainkan peran sentral sebagai landasan yang kokoh. Hukum yang jelas dan tegas mencerminkan prinsip keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Namun, untuk mempertegas hukum dan menjaga proses pembangunan nasional, diperlukan sinergi antara media dan masyarakat. Pendekatan pers yang humanis dapat menjadi pendorong penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan hukum dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Media memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk opini publik dan memengaruhi tindakan masyarakat. Oleh karena itu, peran media dalam membangun masyarakat yang beradab dan memperkuat hukum sangat penting. Dalam konteks ini, pendekatan pers yang humanis menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi media dengan bertanggung jawab.

Konsep media sebagai pilar pembangunan nasional dan bagaimana peran media dapat menguatkan hukum dalam masyarakat. Pendekatan pers yang humanis akan dibahas sebagai landasan yang harus diadopsi oleh media untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, juga akan dibahas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi media dalam mempertegas hukum dan mengawal pembangunan nasional. Media dapat menjadi pengawal pembangunan nasional melalui pemberitaan yang objektif, akurat, dan berimbang. Peran media dalam memperkuat hukum disampaikan melalui upaya memberikan informasi yang jelas dan tepercaya kepada masyarakat, memberikan ruang yang adil untuk suara dan pandangan yang beragam, serta memperjuangkan keadilan sosial.

Dalam berbagai kasus hukum yang pernah terjadi di hukum yang pernah terjadi di Indonesia terlihat peranan penting pers dalam mengawal proses hukum, misalnya dalam kasus Eks Gubernur DKI inisial AB, tentang pelecehan agama, dalam perjalanan kasusnya hamper semua lapisan masyarakat ikut menyaksikan proses hukum yang terjadi, selain itu ada juga kasus Oknum POLRI yang membiarkan anaknya menganiaya orang lain, karena diviralkan oleh masyarakat sehingga status hukumnya jelas dan diproses sesuai dengan

hukum yang berlaku, ditambah lagi kasus hukum salam satu pimpinan POLRI yang merencanakan pembunuhan kepada salah satu anggotanya.

Proses kasus-kasus yang di atas sangat besar peran media dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat umum ikut mengikuti proses persidangan sampai pada keputusan hakim.

Supremasi hukum merupakan cita-cita negara yang harus ditegakkan demi menjamin kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga hukum berjalan setegaktegaknya tanpa pandang bulu. Ketika hukum tercipta secara implisit pembangunan nasional juga akan berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dalam pembangunan nasional sangat diharapkan kolaborasi antara media dengan masyarakat, bahkan masyarakat memiliki peluang untuk berperan menjadi insan pers yang dapat menginformasikan kejadian-kejadian disekitarnya agar tidak luput dari pandangan masyarakat luas.

Pendekatan pers yang humanis dianalisis dalam konteks media dan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan dalam peliputan berita serta interaksi dengan masyarakat. Perspektif ini akan membantu media dalam melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan nasional, memberikan ruang bagi suara mereka, dan mempromosikan persatuan dan kesepakatan sosial.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh media dalam mencapai tujuan ini tidak dapat diabaikan. Dalam karya tulis ini, akan dibahas tentang kendala seperti sensasionalisme, bias media, polarisasi, dan pengaruh kepentingan komersial yang dapat menghalangi pendekatan pers yang humanis. Selain itu, juga dikemukakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan literasi media dan regulasi yang memadai.

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran media dalam mempertegas hukum dan mengawal pembangunan nasional dengan pendekatan pers yang humanis. Melalui pendekatan ini, media dapat berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif desain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail tentang fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dengan instrument observasi dan wawancara. **Hasil dan Diskusi**

1. Peran Media sebagai Wadah Pencerahan

Media, baik cetak maupun elektronik, berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat, objektif, dan mendalam kepada masyarakat. Dalam konteks mempertegas hukum, media dapat menjadi wadah pencerahan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan-peraturan hukum kepada masyarakat. Media juga berperan dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran hukum dan korupsi yang mungkin terjadi, sehingga memperkuat mekanisme hukum dan mengawal integritas pembangunan nasional.

Tujuan utama media massa adalah mengomunikasikan berita kepada masyarakat, dan setiap berita yang disampaikan harus memiliki karakteristik keakuratan, fakta, ketertarikan, kebenaran, keseimbangan, relevansi, dan kebermanfaatan. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan kepada publik seharusnya memberikan pengetahuan dan pembelajaran. (Ahmad Zubaidi)

Media massa memainkan peran penting dalam mengawal pembangunan nasional dengan memberikan informasi, mendorong partisipasi publik, dan mempromosikan akuntabilitas. Berikut adalah beberapa kontribusi media dalam mengawal pembangunan nasional:

a. Pemberitaan Pembangunan:

Media massa memiliki peran utama dalam memberikan informasi tentang program, proyek, dan kebijakan pembangunan nasional kepada masyarakat. Melalui liputan berita yang objektif dan komprehensif, media memberikan pemahaman yang lebih baik tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional. (Mhd.Latip Kahpi, 2023) Hal ini membantu masyarakat untuk

menjadi lebih terinformasi, serta membangun kesadaran dan partisipasi dalam proses pembangunan.

b. Pemantauan dan Evaluasi:

Media massa memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program pembangunan nasional. Dengan melibatkan jurnalisme investigasi dan laporan kritis, media dapat mengungkap kekurangan, penyalahgunaan, atau korupsi dalam implementasi proyek pembangunan. Ini memberikan tekanan pada pemerintah dan pihak terkait untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dialog dan Debat Publik: Media massa berperan dalam menciptakan ruang dialog dan debat publik tentang isu-isu pembangunan nasional. Dengan memberikan suara kepada berbagai kelompok masyarakat, media dapat menghadirkan beragam pandangan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk saling berinteraksi, mengemukakan solusi alternatif, dan mencapai konsensus dalam kebijakan pembangunan.

c. Advokasi dan Pemberdayaan Masyarakat:

Melalui pemberitaan, media massa dapat menjadi agen advokasi bagi isu-isu pembangunan yang penting bagi masyarakat. Media dapat mempromosikan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan kemiskinan, serta mendorong partisipasi publik dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan memberikan ruang dan suara kepada masyarakat, media juga dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas:

Media massa berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan nasional. Dengan melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, tindak korupsi, atau ketidakadilan dalam implementasi proyek pembangunan, media membantu mengungkapkan pelanggaran dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab. Ini mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan menjaga integritas dalam pembangunan nasional.

Dalam menjalankan peran mereka, media massa perlu mematuhi etika jurnalistik, seperti kebenaran, akurasi, independensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan

menjunjung prinsip-prinsip ini, media dapat menjadi kekuatan yang konstruktif dalam mengawal pembangunan nasional dan mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

2. Pemberitaan yang Berspektif Humanis

Pendekatan pers yang humanis menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dalam pemberitaan. Hal ini memungkinkan media untuk mengangkat isu-isu sosial, ekonomi, dan politik dengan berfokus pada dampaknya terhadap masyarakat secara menyeluruh. Dengan memperlihatkan sisi kemanusiaan dalam pemberitaan, media dapat membantu masyarakat memahami urgensi pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan hukum dalam pembangunan nasional.

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Suatu peraturan hanya dapat dijalankan dan diterapkan secara efektif apabila masyarakat memiliki suatu organisasi yang memungkinkan setiap anggotanya untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Donald Black dalam karyanya yang berjudul "The Behavior of Law" menyatakan bahwa setiap peristiwa hukum memiliki struktur sosialnya sendiri. Black juga mengembangkan teori yang menyatakan bahwa keberadaan hukum bervariasi tergantung pada konteks sosialnya.

Jika kita menginginkan perilaku hukum yang positif dalam masyarakat, kita perlu menciptakan struktur sosial yang mendukung. Selama struktur sosial masyarakat tidak mendukung suatu tatanan yang baik, perilaku hukum yang positif akan sulit terwujud. Ini merupakan suatu asumsi. Lebih lanjut, untuk mencapai perilaku hukum yang diinginkan, perbaikan terlebih dahulu harus dilakukan pada struktur sosial di sekitar tempat penerapan hukum.

Diperlukan perbaikan pada struktur ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan keamanan, serta struktur lainnya dalam sistem sosial yang luas. Pandangan ini sangat terkait dengan asumsi bahwa hukum merupakan hasil dari sistem sosial dan merupakan sub-sistem dalam kerangka sosial yang lebih besar. (M. Husni)

Media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan hukum. Melalui

pendekatan pers yang humanis, media dapat memberikan penjelasan yang sederhana dan jelas tentang hak dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Media juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, seperti melalui program-program partisipatif atau diskusi publik, sehingga masyarakat merasa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang berkeadilan.

Media massa memiliki peran yang penting dalam mempertegas hukum di masyarakat. Melalui berbagai platformnya, media dapat menyebarkan informasi, memantau, dan mengawasi pelaksanaan hukum. Berikut adalah beberapa peran media dalam mempertegas hukum:

a. Penyampai Informasi Hukum:

Media massa berperan sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat. Melalui berita, artikel, dan program khusus, media dapat membantu masyarakat memahami undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ada. Dengan menyediakan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan terkini, media dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

b. Pemberitaan Hukum:

Media memiliki tanggung jawab untuk memberitakan perkembangan terkait hukum dan penegakan hukum. Dengan melaporkan kasus-kasus hukum, proses pengadilan, dan keputusan hukum, media memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Media juga dapat mengungkap pelanggaran hukum, korupsi, atau ketidakadilan yang terjadi, sehingga memperkuat tuntutan terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan.

c. Pemantauan Penegakan Hukum:

Melalui jurnalisme investigasi dan pemantauan yang berkelanjutan, media dapat memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hukum oleh lembaga penegak hukum. Dengan mengungkap kelemahan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan tidak adil dalam penegakan hukum, media dapat memengaruhi perbaikan

sistem peradilan dan mendorong akuntabilitas para pelaku hukum. Pendidikan Hukum:

Media massa juga dapat berperan sebagai agen pendidikan hukum. Dengan menyediakan program atau segmen khusus yang membahas hukum secara mendalam, media dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam hukum. (Putra Halomoan, 2023) Ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan mendorong kepatuhan terhadap hukum yang lebih baik. d. Penyeimbang Kekuasaan:

Media massa berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem hukum. Dengan memberikan suara kepada kelompok yang tidak terwakili atau dengan mengungkap ketidakadilan yang terjadi, media dapat memperkuat keadilan dalam penegakan hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang.

Namun, perlu dicatat bahwa media juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perannya secara etis dan profesional. Prinsip-prinsip jurnalisme, seperti kebenaran, akurasi, dan kemandirian, harus dijunjung tinggi agar media dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mempertegas hukum dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

4. Etika Jurnalisme yang Bertanggung Jawab

Dalam mempertegas hukum dan mengawal pembangunan nasional, media perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika jurnalisme yang bertanggung jawab. Media harus memastikan keakuratan informasi, menghindari sensasionalisme, dan menampilkan berbagai sudut pandang yang beragam. Pemberitaan yang adil dan seimbang akan memperkuat legitimasi hukum dan mendukung proses pembangunan nasional yang inklusif.

Dalam menghormati norma-norma etika jurnalistik, hal ini secara erat terkait dengan tingkat profesionalisme seorang jurnalis. Menurut Ashadi Siregar, etika memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme karena berfungsi untuk memastikan bahwa individu yang menjalankan profesi tersebut tetap berkomitmen pada tujuan sosialnya. Dengan demikian, etika profesi berperan dalam menjaga agar praktik profesi tetap sesuai

dengan harapan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, teknik profesi memberikan dukungan bagi pelaku profesi untuk mencapai tujuan mereka, dan etika menjadi panduan untuk memastikan bahwa teknik tersebut digunakan sesuai dengan dasar eksistensial sosial profesi yang bersangkutan. (Fadjarini Sulistyowati).

Etika jurnalisisme yang bertanggung jawab adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur tindakan jurnalis dalam melaksanakan tugas mereka. Etika ini menekankan pentingnya kejujuran, integritas, akurasi, dan pertanggungjawaban dalam melaporkan berita. Tujuan utamanya adalah menjaga standar profesionalisme yang tinggi dan memastikan kepercayaan publik terhadap media. Berikut adalah beberapa poin penting yang harus dipertimbangkan dalam pembahasan etika jurnalisisme yang bertanggung jawab:

a. Kredibilitas dan Kepercayaan Publik:

Jurnalisisme yang bertanggung jawab harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan akurasi. Jurnalis harus berkomitmen untuk menyajikan fakta yang akurat dan menghindari penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi. (Hairul Iman, 2023) Kepercayaan publik adalah aset berharga dalam jurnalisisme, dan melanggarnya dapat merusak integritas dan reputasi media.

Jurnalis harus memverifikasi semua informasi yang mereka terima sebelum mempublikasikannya. Mereka harus mencari sumber yang dapat dipercaya dan diverifikasi untuk memastikan keakuratan berita. Penggunaan sumber anonim harus digunakan dengan hati-hati dan hanya dalam keadaan tertentu yang mendesak.

c. Independensi dan Kemandirian:

Jurnalis harus menjaga independensi mereka dari pengaruh politik, kepentingan bisnis, dan tekanan eksternal lainnya yang dapat mengganggu integritas pemberitaan.

Mereka harus dapat melaporkan secara objektif dan tidak memihak, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (Camong, 2023)

d. Perlindungan Privasi dan Harga Diri:

Jurnalis harus memperhatikan privasi individu yang terlibat dalam berita. Mereka harus menghindari pelecehan, penghinaan, dan pelecehan terhadap orang-orang yang

mereka laporkan. Jurnalis juga harus berhati-hati dalam menggunakan gambar, video, atau informasi pribadi yang dapat merusak harga diri individu tanpa alasan yang kuat.

e. Pemberitaan Sensasionalisme dan Berita Berimbang:

Jurnalis harus menghindari sensasionalisme atau penyajian yang berlebihan dalam pemberitaan mereka. Mereka harus berusaha untuk memberikan konteks yang memadai, melibatkan berbagai perspektif, dan memastikan bahwa berita yang mereka sampaikan seimbang dan objektif.

f. Transparansi dan Koreksi:

Jika terjadi kesalahan dalam pemberitaan, jurnalis harus transparan dalam mengakui kesalahan tersebut. Mereka harus dengan cepat mengoreksi kesalahan dan memberikan klarifikasi yang jelas kepada publik. Juga, jurnalis harus transparan tentang sumber informasi mereka dan potensi konflik kepentingan yang mungkin ada.

g. Etika dalam Penggunaan Teknologi:

Dalam era digital dan sosial media, jurnalis harus memahami dan mengikuti etika penggunaan teknologi. Mereka harus menggunakan media sosial dengan bijak, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menghindari pelecehan daring atau intimidasi terhadap individu atau kelompok.

h. Tanggung Jawab Sosial dan Keberagaman:

Jurnalis memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan pemberitaan yang beragam, inklusif, dan mewakili berbagai perspektif dalam masyarakat. Pentingnya etika jurnalisisme yang bertanggung jawab adalah untuk memastikan bahwa media berfungsi sebagai penjaga kebenaran, wadah informasi yang dapat dipercaya, dan alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menghormati prinsip-prinsip etika ini, jurnalis dapat memelihara integritas mereka dan menjaga kepercayaan publik dalam profesi jurnalisisme.

Kesimpulan

Peranan pers dalam mempertegas penegakan hukum memberikan efek kepada pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi, dalam pendekatan pers yang humanis Media memiliki peran sebagai wadah pencerahan, pemberitaan yang berperspektif

humanis, pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum, dan juga pers harus memiliki etika jurnalistik yang bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Adam, A. (2017, April 19). Agar Generasi Z Tak Fanatik dalam Pemilu [Internet]. Diambil 10 Januari 2019, dari
- Adi, D.S. (2016), “Jurnalisme Publik dan Jurnalisme Warga serta Perannya dalam Meningkatkan Partisipasi Warga dalam Proses Demokrasi”, *Jurnal Nomosleca*, Vol. 2, No. 1, hal. 342 – 365
- Ahmad Zubaidi,dkk. (2020). Peran Media Digital DalamMeningkatkan Partisipasi Politik: Studi Pada Tirto.Id Yogyakarta, *Jurnal Kawistara* Vol.10.No.I <https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/41407>
- Camong. (2023).*Hasil Wawancara*.
- Hairul Iman. (2023).*Hasil Wawancara*.
<https://tirto.id/agar-generasi-z-tak-fanatik-dalam-pemilu-cmlr>
- Lili Rahmawati. (2023,July 12). Kejagung Usung Penegakan Hukum Humanis. *Jambi Antanews*.
- Lili Rasjididan Wysa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu sistem* (Cetakan I). Remaja Rosdakarya.
- Mhd.Latip Kahpi. (2023).*Hasil wawancara*.
- Muhammad mahfud MD. (2013, May 10). *Menegakkan Keadilan JanganSekedar menegakkan Hukum* . [Http://Www.Erabarunet/Opini.Posted](http://Www.Erabarunet/Opini.Posted).
- Mulyana W kusumah. (1992).*Perspektif,Teori dan kebijaksanaan Hukum* (Cetakan III). Rajawali.
- Pasal 4 undang-undang, Pub. L. No. 14 (1970).
- Putra Halomoan. (2023).*Hasil Wawancara*.
- Romli Atmasasmita. (2001).*Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*

(Cetakan III). Raja grafindo Persada.

Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Sisu-sisi Lain Hukum di Indonesia* (Cetakan II). Penerbit Buku Kompas .

Soerjono Soekanto dan Otje Salman. (1996). *Disiplin Hukum dan Disiplin sosial*. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2002). *Faktor- faktor yang Memepengaruhi penegakan Hukum* (cetakan IV). Rajawali.